

PERJANJIAN SUNDA–PORTUGIS 1522 DAN DAMPAK KEGAGALANNYA TERHADAP KERUNTUHAN KERAJAAN SUNDA

Mumuh Muhsin Zakaria

Departemen Sejarah dan Filologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran, Sumedang
E-mail: mumuh.muhsin@unpad.ac.id

ABSTRAK. Perjanjian Sunda-Portugis tahun 1522 merupakan salah satu titik balik krusial dalam historiografi maritim Nusantara abad ke-16. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika geopolitik yang melatarbelakangi aliansi antara Kerajaan Sunda dan Portugis, serta mengidentifikasi bagaimana kegagalan implementasi perjanjian tersebut mempercepat keruntuhan Kerajaan Sunda (Pajajaran). Dengan menggunakan metode sejarah kritis yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, artikel ini membedah dokumen primer seperti laporan Tomé Pires (*Suma Oriental*) dan catatan João de Barros. Landasan teoretis yang digunakan adalah Teori Deharmonisasi Geopolitik dan *Defensive Alliance Failure*. Kebaruan penelitian ini terletak pada reposisi Perjanjian 1522 bukan sekadar sebagai instrumen perdagangan ekonomi, melainkan sebagai bentuk keputusan diplomatik (*diplomatic despair*) Sunda dalam menghadapi ekspansi Islamosentris Demak-Cirebon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan armada Portugis dalam membangun benteng di Sunda Kelapa memberikan kekosongan ruang strategis yang dimanfaatkan oleh Fatahillah pada tahun 1527. Kegagalan aliansi ini tidak hanya menghilangkan akses laut utama Sunda, tetapi juga memicu efek domino isolasi ekonomi-politik yang berujung pada runtuhnya ibu kota Dayeuh Pakuan oleh pasukan Banten pada tahun 1579.

Kata Kunci: Perjanjian Sunda-Portugis 1522, Kerajaan Sunda, Keruntuhan Pajajaran, Geopolitik Maritim, Sunda Kelapa.

THE SUNDA-PORTUGUESE TREATY OF 1522 AND THE IMPACT OF ITS FAILURE ON THE COLLAPSE OF THE SUNDA KINGDOM

ABSTRACT. *The Sunda-Portuguese Treaty of 1522 represents one of the crucial turning points in the maritime historiography of the Nusantara archipelago during the 16th century. This research aims to analyze the geopolitical dynamics underlying the alliance between the Sunda Kingdom and the Portuguese, as well as to identify how the failure to implement the treaty accelerated the collapse of the Sunda Kingdom (Pajajaran). Employing the critical historical method encompassing heuristics, source criticism, interpretation, and historiography, this article examines primary documents such as Tomé Pires's report (*Suma Oriental*) and João de Barros's chronicles. The theoretical framework utilized is the Theory of Geopolitical Disharmonization and Defensive Alliance Failure. The novelty of this research lies in repositioning the 1522 Treaty not merely as an instrument of economic trade, but as a manifestation of Sunda's diplomatic despair in the face of the Islamocentric expansion of Demak-Cirebon. The findings reveal that the delay of the Portuguese fleet in constructing a fort at Sunda Kelapa created a strategic vacuum that was exploited by Fatahillah in 1527. This alliance failure not only eliminated Sunda's primary maritime access but also triggered a domino effect of economic-political isolation, ultimately culminating in the fall of the capital, Dayeuh Pakuan, to Bantenese forces in 1579.*

Keywords: *Sunda-Portuguese Treaty of 1522, Sunda Kingdom, Collapse of Pajajaran, Maritime Geopolitics, Sunda Kelapa.*

PENDAHULUAN

Pada awal abad ke-16, konformitas geopolitik di kawasan barat Nusantara mengalami pergeseran tektonik yang sangat masif. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque pada tahun 1511 tidak hanya mengubah rute perdagangan transnasional, tetapi juga menciptakan guncangan politik bagi kerajaan-kerajaan pribumi (Ricklefs, 2008). Kerajaan Sunda, yang beribu kota di Dayeuh Pakuan (sekarang Bogor), merupakan salah satu entitas politik non-Islam terbesar yang tersisa di bagian barat Pulau Jawa. Di bawah pemerintahan Sri Baduga Maharaja (1482–1521) dan dilanjut-

kan oleh Surawisesa (1521–1535), Kerajaan Sunda menghadapi ancaman eksistensial yang datang dari koridor pesisir utara Jawa, didorong oleh gelombang ekspansi Kesultanan Demak yang berkolaborasi dengan Kesultanan Cirebon (Ekadjati, 2005).

Hubungan antara Sunda dan konfederasi Islam di pesisir utara (*Pesisiran*) dipenuhi oleh ketegangan ideologis dan kompetisi ekonomi. Sunda, yang sangat bergantung pada komoditas lada sebagai tulang punggung ekonominya, memerlukan pelabuhan-pelabuhan utama seperti Kalapa (Sunda Kelapa), Banten, dan Pontang tetap berada di bawah kendalinya (Cortesao, 1944). Namun, penetrasi pengaruh Islam yang

dimotori oleh Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati) di Cirebon mulai mengikis hegemoni Sunda di wilayah pesisir. Mengantisipasi pengepungan geopolitik ini, Sri Baduga Maharaja mengambil langkah diplomatik yang radikal pada masa itu: menjajaki aliansi militer dan dagang dengan kekuatan Eropa yang baru mapan di Malaka, yaitu Portugis.

Upaya diplomatik ini mencapai puncaknya pada tanggal 21 Agustus 1522, ketika utusan Portugis bernama Henrique Leme tiba di Sunda Kelapa dan menandatangani sebuah perjanjian resmi dengan Raja Surawisesa (yang dalam sumber Portugis kerap disebut *Samian* atau *Ratu Samiam*) (Heuken, 2002). Perjanjian ini diabadikan dalam sebuah prasasti batu yang dikenal sebagai *Padrão Sunda Kelapa*. Di atas kertas, perjanjian ini tampak saling menguntungkan: Portugis mendapatkan hak monopoli lada dan izin mendirikan benteng (*feitoria*), sementara Kerajaan Sunda mendapatkan jaminan perlindungan militer dari armada laut Portugis yang ditakuti untuk membendung agresi Demak-Cirebon.

Namun, realitas sejarah mencatat bahwa perjanjian ini berakhir sebagai sebuah kegagalan yang tragis. Portugis terlambat merealisasikan komitmen militernya. Ketika armada Francisco de Sá tiba di Sunda Kelapa pada awal tahun 1527 untuk mulai membangun benteng, pelabuhan tersebut telah jatuh ke tangan pasukan gabungan Demak-Cirebon di bawah komando Fatahillah (Falatehan) (Heuken, 1982). Kegagalan implementasi Perjanjian 1522 ini memicu efek domino yang destruktif bagi Kerajaan Sunda.

Artikel ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana kegagalan teknis-diplomasi antara Sunda dan Portugis berimplikasi langsung terhadap proses keruntuhan sistemik Kerajaan Sunda. Fokus kajian tidak hanya diarahkan pada peristiwa militer di Sunda Kelapa pada tahun 1527, melainkan pada analisis jangka panjang (*longue durée*) mengenai bagaimana hilangnya akses maritim mengisolasi Pajajaran secara ekonomi dan politik, hingga akhirnya runtuh total pada tahun 1579 di tangan Kesultanan Banten.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis yang terdiri dari empat tahapan sistematis: heuristik, kritik sumber (verifikasi), interpretasi (analisis), dan historiografi (Kuntowijoyo, 2018). Heuristik (Pengumpulan Sumber): Pencarian sumber sejarah difokuskan pada dokumen primer kontemporer abad ke-16.

Sumber tertulis utama yang digunakan adalah *Suma Oriental* karya Tomé Pires (1512-1515) yang memberikan gambaran sosiologis dan ekonomi Kerajaan Sunda sebelum perjanjian. Catatan kronik Portugis seperti *Décadas da Ásia* karya João de Barros dan *Chronica do Felicissimo Rei Dom Emanuel* karya Damião de Góis digunakan untuk merekonstruksi detail negosiasi tahun 1522 dan ekspedisi militer tahun 1527. Sebagai penyeimbang (kontra-narasi), peneliti menggunakan sumber lokal seperti *Carita Parahyangan*, *Fragmen Carita Parahyangan*, serta *Babad Cirebon* untuk menangkap perspektif internal masyarakat Sunda dan Jawa. Kritik Sumber: Sumber-sumber Portugis diuji otentisitas dan kredibilitasnya mengingat bias kolonial dan tendensi glorifikasi Kristenisasi sering muncul dalam laporan mereka. Misalnya, klaim kekuasaan Portugis atas Sunda dalam catatan João de Barros disilang-uji dengan bukti arkeologis *Padrão Sunda Kelapa* yang ditemukan di Batavia pada tahun 1918. Interpretasi: Data yang telah diverifikasi kemudian dianalisis menggunakan pendekatan multidimensional, menggabungkan ilmu politik (geopolitik maritim) dan sosiologi militer. Peneliti menghubungkan fakta-fakta fragmentaris antara keterlambatan Portugis di Malaka dengan dinamika internal pertahanan darat Sunda. Historiografi: Tahap akhir adalah menyusun sintesis sejarah secara naratif-analitis, menyajikan argumen baru mengenai hubungan kausalitas antara kegagalan diplomasi 1522 dan kejatuhan ibu kota Dayeuh Pakuan pada 1579.

Untuk membedah kompleksitas dampak Perjanjian Sunda-Portugis 1522, penelitian ini mengoperasionalkan dua teori utama dari rumpun studi hubungan internasional dan geopolitik:

Teori Aliansi Defensif yang Gagal (*Defensive Alliance Failure*).

Menurut Stephen M. Walt dalam *The Origins of Alliances*, sebuah aliansi dibentuk berdasarkan persepsi terhadap ancaman (*balance of threat*) (Walt, 1987). Ketika suatu negara merasa kapabilitas militernya tidak mampu menandingi ancaman eksternal, ia akan melakukan *alliance-seeking behavior* (perilaku mencari aliansi). Namun, Walt juga menggarisbawahi adanya risiko *abandonment* (peninggalan) dalam aliansi tak seimbang.

Dalam konteks Sunda-Portugis, Kerajaan Sunda bertindak sebagai aktor yang rentan (*vulnerable state*) yang mengorbankan sebagian kedaulatan ekonomi (monopoli lada) demi mendapatkan komitmen keamanan (*security*

guarantee) dari aktor transnasional (Portugis). Kegagalan aliansi ini terjadi karena adanya ketimpangan prioritas geopolitik; bagi Portugis, Sunda hanyalah sekadar pos dagang periferi dibandingkan dengan pertahanan Malaka dan ekspansi ke Maluku, sementara bagi Sunda, aliansi ini adalah penentu hidup dan mati kerajaan.

Teori Deharmonisasi Geopolitik dan Isolasi Maritim.

Teori yang dikembangkan oleh Geoffrey Parker mengenai ruang geopolitik menekankan bahwa kekuatan sebuah kerajaan agraris-maritim sangat bergantung pada kemampuannya menguasai *choke points* (titik jepit) perdagangan (Parker, 1998). Ketika sebuah kerajaan kehilangan akses terhadap gerbang maritimnya (*seaborn e outlets*), terjadi proses pembusukan internal atau deharmonisasi geopolitik.

Kehilangan Sunda Kelapa dan Banten memaksa Kerajaan Sunda mengalami reteritorialisasi ke pedalaman (*landlocked state*). Berdasarkan teori ini, isolasi maritim secara otomatis memotong suplai kekayaan (bea cukai dan perdagangan lada) yang dibutuhkan untuk membiayai tentara bayaran (*mercenaries*) dan merawat benteng pertahanan di pedalaman, yang mempercepat keruntuhan struktur politik pusat.

Sebagian besar historiografi konvensional—seperti yang ditulis oleh Edi S. Ekadjati atau Adolf Heuken—melihat Perjanjian Sunda-Portugis 1522 sebagai peristiwa sejarah lokal yang terisolasi, atau sekadar pemantik bagi pertempuran Sunda Kelapa 22 Juni 1527 yang kemudian diperingati sebagai hari lahir Kota Jakarta (Heuken, 2002). Fokus mereka umumnya tertuju pada heroisme Fatahillah dalam mengusir kolonialisme Barat.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada tiga reposisi analitis: Pertama, penelitian ini membuktikan bahwa Perjanjian 1522 bukan sekadar perjanjian dagang komoditas lada, melainkan sebuah dokumen keputusan diplomatik (*diplomatic despair*) dari Raja Surawisesa. Melalui analisis mendalam terhadap teks prasasti *Padrão* dan catatan João de Barros, kami menunjukkan bahwa Sunda bersedia memberikan konsesi yang sangat ekstrem (tanah untuk benteng dan upeti lada tahunan) karena kalkulasi intelijen mereka menunjukkan bahwa serangan Demak-Cirebon sudah berada di ambang pintu (*imminent threat*).

Kedua, artikel ini mematahkan mitos bahwa Kerajaan Sunda langsung runtuh setelah tahun 1527. Dengan melacak narasi dalam *Carita Parahyangan*, kami memperlihatkan resiliensi

militer Surawisesa yang melakukan 15 kali pertempuran darat pasca-1527 untuk menahan laju pasukan Islam.

Ketiga, kami menyajikan analisis kausalitas linier-sistemik yang menghubungkan kegagalan implementasi perjanjian ini dengan kehancuran total ibu kota Dayeuh Pakuan pada tahun 1579, sebuah perspektif jangka panjang (*longue durée*) yang jarang diulas secara utuh dalam satu kesatuan artikel ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konteks Geopolitik Jawa Awal Abad ke-16.

Sebelum kedatangan Portugis, Kerajaan Sunda adalah kekuatan ekonomi yang disegani karena menguasai produksi lada kualitas terbaik di dunia barat. Tomé Pires dalam *Suma Oriental* mencatat:

"Kerajaan Sunda adalah negeri yang besar, berbatasan dengan Kerajaan Jawa di satu sisi... Negeri ini memiliki pelabuhan-pelabuhan yang sangat baik: Banten, Pontang, Cigede, Tamgara, Kalapa, dan Cimanuk. Komoditas utamanya adalah lada, yang menghasilkan hingga 4.000 bahar per tahun..." (Cortesao, 1944).

Namun, kemakmuran ini dibayangi oleh runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Demak sebagai imperium Islam maritim pertama di Jawa. Demak, di bawah Sultan Trenggana, menerapkan strategi islamisasi yang agresif sekaligus ekspansionis demi menguasai seluruh jalur perdagangan lada di Pantai Utara Jawa (Pantura) (Suryanegara, 1995). Cirebon, yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati, bertindak sebagai ujung tombak Demak di wilayah barat, tepat di perbatasan langsung dengan wilayah timur Kerajaan Sunda.

Bagi Sunda, konversi agama para penguasa pesisir bukan sekadar masalah teologis, melainkan ancaman langsung terhadap stabilitas politik. Pelabuhan Banten dan Kalapa mulai disusupi oleh agen-agen politik Islam. Sri Baduga Maharaja menyadari bahwa pasukannya unggul dalam pertempuran darat (infanteri), tetapi sangat lemah dalam pertempuran laut (*naval warfare*). Mereka tidak memiliki armada kapal perang *jong* besar seperti milik Demak yang mampu membawa meriam-meriam berat. Ketimpangan teknologi militer inilah yang mendorong Sunda untuk melirik Portugis yang terbukti memiliki keunggulan absolut dalam teknologi maritim (*naval supremacy*) pasca-penaklukan Malaka 1511.

2. Diplomasi 1522 dan Klausul Perjanjian.

Pada tahun 1512, Sri Baduga telah mengutus putranya, Samiam (Surawisesa), ke Malaka untuk menjajaki hubungan dengan Rui de Brito Patalim (Barros, 1777). Namun, baru pada tahun 1522, ketika Surawisesa naik takhta menggantikan ayahnya, negosiasi tersebut diformalisasikan. Gubernur Portugis di Malaka, Jorge de Albuquerque, mengutus Henrique Leme dengan membawa sebuah kapal bermuatan barang dagangan untuk menemui Raja Sunda.

Pada tanggal 21 Agustus 1522, sebuah perjanjian resmi disepakati di Sunda Kelapa. Pihak Sunda diwakili oleh Padam Tumanggung (Pejabat Tinggi Kelapa) atas perintah Surawisesa. Isi utama perjanjian tersebut meliputi tiga poin krusial:

- 1) Portugis diizinkan membangun sebuah benteng pertahanan (*feitoria* atau *fortress*) di area pelabuhan Sunda Kelapa untuk melindungi diri dan sebagai basis logistik.
- 2) Kerajaan Sunda berkomitmen untuk menyerahkan sejumlah 1.000 bahar lada setiap tahun kepada Raja Portugis sebagai bentuk upeti sekaligus komoditas dagang tetap.
- 3) Portugis berkewajiban memberikan perlindungan militer kepada Kerajaan Sunda apabila diserang oleh kekuatan musuh (dalam hal ini, aliansi Demak-Cirebon) (Heuken, 2002).

Sebagai simbol pengesahan, didirikanlah sebuah batu *Padrão* di lokasi yang direncanakan menjadi benteng. Bagi Surawisesa, klausul ketiga (perlindungan militer) adalah esensi dari seluruh pengorbanan ekonomi yang ia berikan. Ia membayangkan meriam-meriam Portugis dari kapal *galleon* akan berlabuh di Teluk Jakarta, menciptakan perisai laut yang tidak tembus oleh armada Demak.

PARAMETER KEPENTINGAN KERAJAAN SUNDA DAN PORTUGIS

PARAMETER	KERAJAAN SUNDA (Surawisesa)	PORTUGIS (Henrique Leme)
Kepentingan Utama	Keamanan militer & eksistensi politik	Monopoli perdagangan lada & pangkalan laut
Konsesi yang Diberikan	Hak tanah benteng & 1.000 bahar lada/tahun	Janji perlindungan armada laut
Kelemahan Strategis	Ketiadaan armada laut pribumi yang kuat	Birokrasi lambat & jarak Malaka-Sunda yang jauh

3. Kronologi Kegagalan: Mengapa Portugis Terlambat?

Kegagalan Perjanjian 1522 tidak terletak pada penolakan diplomasi, melainkan pada ketidakmampuan operasional militer Portugis untuk memenuhi janji mereka tepat waktu. Ada jeda waktu lima tahun (1522–1527) antara penandatanganan perjanjian dan upaya realisasi pembangunan benteng. Mengapa kelambatan fatal ini terjadi?

Berdasarkan catatan João de Barros dalam *Décadas da Ásia*, Goa (pusat kekuasaan Portugis di India) dan Malaka sedang mengalami krisis internal (Barros, 1777). Masalah suksesi gubernur, konflik internal di India, serta ancaman konstan dari Kesultanan Johor dan Aceh Darussalam menyerap sebagian besar perhatian dan sumber daya militer Portugis di Asia. Proyek Sunda Kelapa dianggap sebagai proyek sekunder oleh Gubernur Jenderal Portugis di India, D. Sancho de Noronha.

Baru pada tahun 1526, Gubernur Malaka mengirimkan Francisco de Sá untuk memimpin ekspedisi ke Sunda Kelapa dengan membawa enam buah kapal perang (Gois, 1926). Namun, nasib buruk menimpa armada ini. Di tengah perjalanan, mereka dihantam badai besar di dekat Kepulauan Bangka. Salah satu kapal brigantin utama karam, dan sisa armada terpaksa merapat ke tempat lain untuk melakukan perbaikan darurat. Kelambatan logistik dan faktor alam ini berakibat fatal secara geopolitik.

4. Kejatuhan Sunda Kelapa (1527) dan Konsekuensi Militer Immediate.

Selama jeda lima tahun tersebut, intelijen Demak-Cirebon bergerak cepat. Sunan Gunung Jati dan Sultan Trenggana mengetahui adanya pakta pertahanan Sunda-Portugis. Mereka menyadari jika Portugis berhasil membangun benteng permanen di Sunda Kelapa, maka peluang Islam untuk menguasai Jawa bagian barat akan tertutup rapat (D.A. Rinkes & Brandes, 1911). Oleh karena itu, diperintahkanlah Fatahillah (seorang panglima militer asal Pasai yang mengabdikan pada Demak) untuk memimpin ekspedisi ofensif mendahului kedatangan Portugis.

Pada akhir tahun 1526 atau awal 1527, pasukan Fatahillah terlebih dahulu merebut Banten, pelabuhan barat Sunda, dengan memanfaatkan konversi Islam dari penguasa lokal setempat. Setelah Banten jatuh, pasukan Fatahillah yang berjumlah ribuan prajurit bergerak mengepung Sunda Kelapa dari darat dan laut. Pasukan pertahanan Sunda di bawah Padam Tumanggung tidak mampu menahan

serbuan ini; mereka kalah jumlah dan teknologi taktis infanteri. Sunda Kelapa jatuh ke tangan Fatahillah.

Ketika Francisco de Sá akhirnya tiba di perairan Sunda Kelapa pada awal tahun 1527, ia tidak lagi melihat bendera Kerajaan Sunda berkibar, melainkan panji-panji pasukan Islam. Tidak menyadari situasi yang telah berubah total, Portugis mengirim sekelompok kecil prajurit ke darat untuk bernegosiasi. Pasukan Fatahillah langsung menyergap dan membantai mereka. Menyaksikan pasukannya dibantai dan menyadari benteng pertahanan pantai musuh terlalu kuat, Francisco de Sá memerintahkan armadanya mundur kembali ke Malaka dengan tangan hampa (Heuken, 1982).

Peristiwa tragis ini menandai runtuhnya validitas Perjanjian 1522. Kerajaan Sunda ditinggalkan sendirian (*abandoned*) oleh sekutu Europanya di saat yang paling kritis. Fatahillah kemudian mengubah nama Sunda Kelapa menjadi *Jayakarta* (Kemenangan yang Sempurna) sebagai simbol atas kemenangan mereka menggagalkan aliansi non-Islam tersebut (Suryanegara, 1995).

Dampak Sistemik Terhadap Keruntuhan Kerajaan Sunda (1527–1579).

Kegagalan Perjanjian 1522 bukanlah akhir dari Kerajaan Sunda, tetapi merupakan awal dari sebuah proses "pembusukan perlahan" (*slow decay*) yang berlangsung selama 52 tahun hingga keruntuhan totalnya pada 1579. Dampak kegagalan ini dapat diklasifikasikan ke dalam tiga aspek sistemik:

A. Isolasi Maritim dan Kebangkrutan Ekonomi

Dengan jatuhnya Banten dan Sunda Kelapa pada tahun 1527, Kerajaan Sunda secara geopolitik berubah menjadi negara pedalaman yang terisolasi (*landlocked state*). Kontrol Sunda atas perdagangan lada internasional langsung terputus. Pembeli-pembeli asing dari Tiongkok, India, dan Arab tidak lagi bertransaksi dengan pejabat Sunda di Pakuan, melainkan dengan para syahbandar Muslim di Banten dan Jayakarta (Ricklefs, 2008).

Hilangnya pendapatan dari bea cukai pelabuhan dan monopoli lada berdampak masif pada kas kerajaan. Berdasarkan hukum ekonomi-politik kerajaan kuno, tanpa likuiditas keuangan yang cukup, seorang raja tidak dapat mempertahankan loyalitas para penguasa daerah (*vassal*), tidak mampu membiayai infrastruktur pertahanan, dan yang paling krusial: tidak mampu membeli persenjataan modern (seperti senapan

sundut/*matchlock* dan meriam) dari pedagang asing untuk mengimbangi persenjataan Demak-Banten.

B. Perang Atrisi Darat yang Melelahkan (*War of Attrition*)

Kitab *Carita Parahyangan* memberikan gambaran yang sangat dramatis mengenai masa pemerintahan Raja Surawisesa pasca-tragedi 1527. Jurnal lokal ini mencatat bahwa Surawisesa harus memimpin sendiri 15 kali pertempuran besar selama masa pemerintahannya untuk mempertahankan sisa-sisa wilayah Sunda dari serbuan Demak, Cirebon, dan Banten: "...Prabu Surawisesa... lawasnya jadi raja 14 tahun. Kaselingan ku perang. Perang ka Kalapa, perang ka Banten, perang ka Aneu, perang ka Tangguntara..." (Atja, 1986; *Carita Parahyangan. Manuskrip Titipan Pangeran Wangsakerta, Koleksi Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, Kode Plt. 406.*, n.d.).

Meskipun *Carita Parahyangan* memuji keberanian Surawisesa yang berhasil memenangkan beberapa pertempuran darat dan berhasil mempertahankan kemandirian ibu kota Dayeuh Pakuan, perang konstan ini merupakan sebuah *war of attrition* (perang atrisi) yang menghabiskan demografi penduduk dan merusak lahan pertanian padi yang menjadi basis logistik pangan Sunda. Setiap pertempuran mengikis jumlah ksatria Sunda yang terlatih, sementara pihak Kesultanan Islam selalu mendapatkan suplai tentara baru dari Jawa Tengah dan demografi lokal yang baru masuk Islam.

C. Erosi Legitimasi Politik dan Desersi Vassal.

Pasca-Surawisesa wafat pada tahun 1535, Kerajaan Sunda dipimpin oleh raja-raja yang lebih lemah: Ratu Dewata (1535–1543), Ratu Sakti (1543–1551), Nilakendra (1551–1567), dan Prabu Surya Kencana (1567–1579). Kegagalan aliansi dengan Portugis menciptakan persepsi di mata para penguasa daerah (*vassal*) bahwa wangsa Pajajaran telah kehilangan mandat kosmisnya (*wahyu keprabon*) untuk melindungi rakyatnya (Ekadjati, 1995).

Satu demi satu wilayah bawahan Sunda di pedalaman melakukan desersi politik. Sebagian beralih secara sukarela menjadi sekutu Banten demi mengamankan rute dagang ekonomi mereka, sementara yang lain jatuh melalui penaklukan militer. Proses penyusutan wilayah ini membuat Dayeuh Pakuan terisolasi di tengah kepungan wilayah yang telah di-islamkan. Pada masa pemerintahan Ratu Nilakendra, kondisi ibu kota sudah sangat memprihatinkan; upacara keagamaan diabaikan, dan raja sendiri

terpaksa melarikan diri dari ibu kota ketika pasukan Banten mendekat (Darsa, 2004).

D. Klimaks 1579: Penghancuran Dayeuh Pakuan oleh Maulana Yusuf

Efek domino dari kegagalan tahun 1522 mencapai puncaknya pada tahun 1579. Kesultanan Banten, yang kini telah tumbuh menjadi imperium maritim baru yang mandiri di bawah Sultan Maulana Yusuf, melancarkan serangan total (*total offensive*) ke ibu kota Dayeuh Pakuan (Ekadjati, 2005).

Tanpa adanya sekutu luar (Portugis sudah tidak lagi memiliki kemampuan atau ketertarikan untuk membantu), tanpa ekonomi maritim, dan dengan benteng parit yang tidak terawat, Dayeuh Pakuan jatuh dengan mudah. Pasukan Banten menghancurkan tembok kota dan memboyong batu sakral *Palangka Sriman Sriwacana* (singgasana tempat duduk penobatan raja Sunda) dari Pakuan ke Keraton Surosowan di Banten (Heuken, 1982). Pemindahan batu ini secara simbolis dan politis menandai berakhirnya eksistensi Kerajaan Sunda secara permanen. Tradisi Sunda mencatat peristiwa ini dengan pilu melalui istilah *Runtagna Pajajaran* (Runtuhnya Pajajaran).

SIMPULAN

Perjanjian Sunda-Portugis 1522 bukan sekadar lembaran kertas diplomatik yang gagal diaplikasikan secara teknis, melainkan merupakan katalisator utama yang mempercepat runtuhnya konstruksi politik Kerajaan Sunda di atas tanah Jawa. Sebagai sebuah keputusan diplomatik yang lahir dari keputusan (*diplomatic despair*), aliansi ini gagal karena ketidakseimbangan komitmen geopolitik; Portugis terlalu lambat mengeksekusi pembangunan benteng di Sunda Kelapa akibat kendala birokrasi, badai alam, dan krisis internal di Malaka-Goa.

Konsekuensi dari kegagalan aliansi defensif (*defensive alliance failure*) ini sangat destruktif bagi Sunda. Kekosongan militer di pantai utara dimanfaatkan dengan jitu oleh Fatahillah pada tahun 1527, mengakibatkan hilangnya Sunda Kelapa dan Banten secara permanen. Kehilangan dua urat nadi ekonomi ini memaksa Sunda mengalami isolasi maritim yang berujung pada kebangkrutan fiskal. Meskipun para ksatria Sunda di bawah Surawisesa menunjukkan resiliensi yang luar biasa melalui perang atrisi darat, ketiadaan dana dagang, erosi legitimasi, dan desersi wilayah bawahan membuat kejatuhan total ibu kota Dayeuh Pakuan

pada tahun 1579 oleh Kesultanan Banten menjadi sebuah keniscayaan sejarah. Kasus sejarah ini menjadi bukti nyata dalam studi geopolitik bagaimana kegagalan sebuah aliansi internasional bagi negara yang rentan (*vulnerable state*) dapat berakibat pada kepunahan eksistensial negara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Atja. (1986). *Carita Parahyangan*. Nusalarang.
- Barros, J. de. (1777). *Da Asia de Joao de Barros : dos feitos que os portuguezes fizeram no descobrimento e conquista dos mares e terras do Oriente : decada quarta, parte primeira* (Dari Asia karya João de Barros: tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang Portugis dalam penemuan dan penaklukan lautan serta negeri-negeri di Timur: dasawarsa keempat, bagian pertama). Lisboa: na Regia Officine Typografica.
- Carita Parahyangan. Manuskrip Titipan Pangeran Wangsakerta, Koleksi Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, Kode Plt. 406. (n.d.).
- Cortesao, A. Z. (1944). The Suma Oriental of Tome Pires and The Book of Francisco Rodrigues. *The Hakluyt Society*, 367.
- D. A. Rinkes, D. A., & Brandes, J. L. . (1911). *Babad Tjerbon: Uitvoerige Inhoudso-pagave en Notes*. Albrecht & Co.
- Darsa, U. A. (2004). "Kropak 406; Carita Parahyangan dan Fragmen Carita Parahyangan", Makalah disampaikan dalam Kegiatan Bedah Naskah Kuna yang diselenggarakan oleh Balai Pengelolaan Museum Negeri Sri Baduga.
- Ekadjati, E. S. (1995). *Sunda, Nusantara, dan Indonesia; Suatu Tinjauan Sejarah. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran pada Hari Sabtu, 16 Desember '1995*.
- Ekadjati, E. S. (2005). *Kebudayaan Sunda; suatu Pendekatan Sejarah* (Vol. 1). Pustaka Jaya.
- Gois, D. de. (1926). *Crónica do Felicissimo Rei D. Manuel (Kronik Raja Manuel yang Maha Bahagia)*. Imp. da Universidade.
- Heuken, A. (1982). *Historical Sites of Jakarta*. Cipta Loka Caraka.

- Heuken, A. (2002). *The earliest Portuguese sources for the history of Jakarta*. Yayasan Cipta Loka Caraka.
- Kuntowijoyo. (2018). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Parker, G. (1998). *Geopolitics: Past, Present and Future*. Pinter.
- Ricklefs, M. C. (2008). *A History of Modern Indonesia Since c. 1200* (4th ed.). Stanford University Press.
- Suryanegara, A. M. (1995). *Menemukan sejarah: Wacana pergerakan Islam di Indonesia*. Mizan.
- Walt, S. M. (1987). *The Origins of Alliances*. Cornell University Press.